

IMPLEMENTASI BUDAYA DEMOKRASI UNTUK MEMBENTUK *CIVIC DISPOSITION* PADA HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IKIP-PGRI PONTIANAK

¹Muhammad Anwar Rube'i, ²Andi Ridwansyah

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
IKIP-PGRI Pontianak, Jl. No. 88 Pontianak - 78116
anwarptk87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Budaya Demokrasi Untuk Membentuk *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) Pada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HIMA PPKn) IKIP-PGRI Pontianak. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu: memiliki kepribadian demokratis, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, memiliki tanggung jawab, memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan. Apabila nilai-nilai budaya demokrasi dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) pada mahasiswa.

Kata Kunci: Budaya Demokrasi, Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan), HIMA PPKn

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan bersikap yang dilandasi dengan etika, aturan, kejujuran dan keadilan. Namun yang terjadi saat ini bangsa Indonesia tengah dilanda 'euforia' demokrasi, dimana aspirasi rakyat nyaris tidak dapat terbendung dengan perilaku-perilaku anarkis sehingga dapat merusak tatanan demokrasi yang selama ini telah dibangun.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, terutama setelah lahirnya reformasi yang menuntut adanya perbaikan sendi-sendi kehidupan baik dalam segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kehidupan masyarakat pada era globalisasi sekarang ini juga perlu disikapi oleh pemerintah terutama yang erat kaitannya dengan kehidupan demokrasi, dan semua bentuk penyimpangan dalam hal demokrasi perlu diselesaikan agar tidak merusak tatanan sendi kehidupan yang lain, yang nantinya dapat merusak semangat demokrasi itu sendiri. Kenyataan ini, menurut Sumantri (dalam Winaputra 2012:103) disebut "*undemocratic democracy*," yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur (institusi) demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi.

Sejalan dengan pendapat di atas Budimansyah (2008:133) menyatakan bahwa budaya demokrasi tidak dibawa sejak lahir, nilai dan prosedur demokrasi harus dipelajari. Oleh karenanya pembelajaran demokrasi merupakan suatu keharusan ditanamkan dalam proses pendidikan. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa sebagaimana hal tersebut tersirat dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana menyatakan tujuan pendidikan adalah: “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Senada dengan pendapat di atas Branson (1999:4) menyebutkan bahwa PKn sendiri berfungsi mengembangkan tiga kemampuan kewarganegaraan yang terdiri dari; “*Civic Knowledge* (pengetahuan Kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan Kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak Kewarganegaraan)”. Menurut Branson (1998:23) “*civic disposition*” mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional”.

Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Sejalan dengan itu Quigley (Komalasari, 2008:85) mengatakan bahwa: “...*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles.*”

Dari ungkapan Quigley bahwa kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, sikap kompromi, toleransi terhadap keragaman, kesadaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Sejalan dengan paparan di atas pembentukan *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) merupakan usaha sadar untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis seperti yang diamantkan dalam UU No 20 tahun 2003 dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Hal tersebut menempatkan PKn dalam pendidikan demokrasi sebagai “*education for democracy*” yaitu menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki demokrasi secara terus menerus.

Secara umum upaya pembentukan *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) dapat diupayakan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang bernuansa demokrasi dengan membudayakan budaya demokrasi, sehingga menjadikan kampus sebagai wahana penanaman budaya demokrasi dengan kesadaran perlunya keterlibatan/penglibatan mahasiswa dalam melaksanakan budaya demokrasi.

Dalam implementasi budaya demokrasi di lingkungan kampus organisasi menjelma sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi berfungsi mengembangkan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler (*Pasal 14 ayat 1 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*).

Organisasi mahasiswa dilingkup IKIP-PGRI Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Pedoman Ormawa IKIP-PGRI Pontianak 2015 struktur organisasi kemahasiswaan terdiri atas Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS/Himpunan Mahasiswa/Forum Komunikasi Mahasiswa Program Studi) serta Unit Kerja Mahasiswa (UKM).

Himpunan Mahasiswa PPKn (HIMA PPKn) adalah wadah organisasi kemahasiswaan dilingkungan kampus yang berbasis kepada bidang ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). Menurut Buku Pedoman Operasional IKIP-PGRI Pontianak (2013:65) “Himpunan Mahasiswa PPKn berfungsi sebagai wadah penunjang dan pengembangan proses peningkatan kualitas dan kemampuan profesional mahasiswa pada tingkat program studi”. Jadi fungsi organisasi HIMA PPKn dilembaga IKIP-PGRI Pontianak adalah sebagai wadah penunjang dan pengembangan proses peningkatan kualitas serta kemampuan mahasiswa pada tingkat program studi.

Harapannya pelaksanaan budaya demokrasi pada HIMA PPKn dapat diimplementasikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang baik. Namun kenyataannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program kerja HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi pemikiran akan pelaksanaan budaya demokrasi dan kurangnya koordinasi antar pengurus dalam perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan HIMA PPKn, yang menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan yang menjadi program kerja HIMA PPKn seperti, Pemilihan Ketua Panitia dan pengurus kegiatan, Rapat Pengurus, MUBES, dan Pemilihan Ketua HIMA melalui Pemilihan Umum.

Pelaksanaan budaya demokrasi dilingkungan kampus seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal dan dikembangkan dalam berbagai kegiatan perkuliahan maupun organisasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan John Dewey (dalam Zamroni (2003:81) Demokrasi adalah

pandangan hidup yang dicerminkan dari perlunya partisipasi warga negara dalam membentuk nilai-nilai dalam kehidupan bersama.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Implementasi Budaya Demokrasi Untuk Membentuk *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) Pada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HIMA PPKn) IKIP-PGRI Pontianak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara sistematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mem-berikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi langsung, komunikasi langsung, dokumentasi, triangulasi, dan studi literatur. Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka subjek yang diteliti adalah Pengurus HIMA PPKn, Kabag Kemahasiswaan, Dosen Prodi PPKn, dan mahasiswa Prodi PPKn. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Nilai Budaya Demokrasi yang diimplementasikan HIMA PPKn

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa, nilai budaya demokrasi adalah nilai-nilai demokrasi yang menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Wujud nilai budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti: memiliki kepribadian demokratis; memberikan kebebasan mengemukakan pendapat; memiliki tanggung jawab; memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan yang kuat.

Secara sederhana Budiardjo (1978:50), mengatakan demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* dan *kratos/kratein*, *Demos* berarti rakyat. dan *kratein* berarti kekuasaan/berkuasa". Jadi, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Selanjutnya Kartono (1989:67) menjelaskan bahwa: "Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dan lembaga orde kenegaraan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggungjawab".

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan

untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, sistem sosial, maupun sebagai wawasan, sikap, perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan demi terciptanya tujuan berdemokrasi dimana aspirasi dan kehendak rakyat merupakan keharusan untuk diwujudkan.

Sejalan dengan paparan di atas Ilham Surya Fallo, (Dosen Kemahasiswaan IKIP-PGRI Pontianak) mengatakan bahwa: “Demokrasi adalah suatu kondisi mendengarkan aspirasi dan masukan yang lebih baik untuk organisasi, walaupun dalam situasi dan kondisi bagaimana pun mendengar dan memutuskan dengan musyawarah. Selama ini wujud nilai budaya demokrasi di HIMA PPKn sudah cukup baik, dijalankan dengan kesadaran. hal tersebut tercermin dengan sikap pengurus HIMA PPKn yang menghargai pendapat dikala rapat bersama, memiliki tanggung jawab, memiliki rasa kebersamaan, dan sikap nasionalisme yang cukup baik”.

Senada dengan pendapat di atas, Khairatullisan (Ketua HIMA PPKn) mengatakan bahwa; “Demokrasi adalah suatu bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat, menyuarakan aspirasi, dan mendegar. Sejauh ini wujud nilai budaya demokrasi yang di implemetasikan HIMA PPKn sudah baik, dengan melakukan musyawarah dalam menentukan tempat, waktu, bahkan tema, dari suatu kegiatan, selain itu membudayakan 5 S yaitu, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, menerima pendapat orang lain, terbuka terhadap ide-ide baru, bertanggung jawab, memiliki sikap toleransi, dan selalu membuka ruang untuk menyampaikan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, serta memiliki nasionalisme yang kuat”.

Berdasarkan teori dan pendapat informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat yang memberikan kebebasan seluas luasnya kepada warga negara untuk mengemukakan ide, gagasan maupun tindakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya hasil observasi yang menunjukkan bahwa nilai budaya demokrasi sudah diimplementasikan HIMA PPKn hal tersebut ditunjukkan dengan sikap pengurus seperti; Memiliki Kepribadian Demokratis, diwujudkan melalui sikap hangat pada orang lain, ramah dan saling menyapa; Menjunjung Tinggi Toleransi, diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, termasuk perbedaan sudut pandang dan pendapat; Kebebasan Mengemukakan Pendapat ditunjukkan dengan tersedianya ruang kebebasan berpendapat yang diberikan oleh HIMA PPKn; Memiliki Kebersamaan, dengan menciptakan suasana kekeluargaan dan hubungan yang kuat guna memperkuat tali persaudaraan; Mengutamakan kepentingan publik, sikap kerelaan mengorbankan kepentingan atau keperluannya sendiri tetapi mengutamakan kepentingan HIMA PPKn; Memiliki Nasionalisme yang ditunjukkan dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, salam kebangsaan organisasi HIMA PPKn.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wujud nilai budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti: memiliki kepribadian demokratis, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, memiliki tanggung jawab, memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan yang kuat. Hal tersebut senada dengan pendapat Cholisin (2013:91) yang mengemukakan mengenai karakter warga negara yang demokratis seperti: (1) warga negara yang memiliki kepribadian demokratis; (2) berbudaya politik partisipan; (3) sebagai *generator citizen*; (4) mengutamakan kepentingan publik; (5) memiliki nasionalisme yang kuat.

Program kegiatan implemmentasi budaya demokrasi yang dilakukan HIMA PPKn dalam membentuk *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program kegiatan Implementasi Budaya Demokrasi yang dilakukan HIMA PPKn selama ini upaya membentuk budaya demokrasi untuk membentuk *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) dilakukan melalui kegiatan: Stand Kreasi, Silaturahmi Lingkungan Akademis (SILA), Pengenalan Kemampuan Wawasan Ilmiah (PKWI), Bakti Sosial (BAKSOS), Program Pengenalan Wawasan Nilai Sosial (PPWNS), Musyawarah Besar (MUBES), dan Komisi Pemilu Raya (KPR).

Stand Kreasi HIMA PPKn

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan mahasiswa baru tentang Kampus, Program Studi PPKn, dan HIMA PPKn itu sendiri, kegiatan stand kreasi tersebut terdiri dari gambar gambar yang berbaur demokrasi, Penegakan Hukum, Sistem Pemerintahan, Pemilu, Sosial Kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya sebelum dimulai pengurus HIMA PPKn melakukan rapat, penentuan tanggal, tema, tempat, dan waktu kegiatan tersebut. Sebelum pelaksanaannya HIMA PPKn mengumpulkan mahasiswa baru untuk melakukan sosialisasi, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk masuk kedalam stand, bertanya dan melihat lihat apa yang terdapat di dalam stand kreasi tersebut.

Silaturahmi Lingkungan Akademis (SILA) HIMA PPKn

Merupakan program tahunan HIMA PPKn yang bertujuan menjalin silaturahmi antara senior, dosen dan mahasiswa baru. dalam pelaksanaannya ada dialog, diskusi dan kesempatan bertanya kepada mahasiswa baru dan dosen, dalam pelaksanaannya sebelum dimulai pengurus HIMA PPKn melakukan rapat, pembentukan kepanitiaan, penentuan tanggal, tema, tempat, dan waktu kegiatan tersebut. HIMA PPKn juga mengumpulkan mahasiswa baru untuk melakukan sosialisasi dari waktu, tempat, pakaian, atribut yang harus di bawa, dalam rapat tersebut ada kompromi dan negosiasi sehingga diputuskan menjadi aturan yang akan dipakai dan disepakati.

PKWI (Pengenalan Kemampuan Wawasan Ilmiah)

Merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, untuk membentuk karakter mahasiswa PPKn, dengan pemikiran yang ilmiah, Adapun bentuk kegiatannya seperti kuliah umum, yang diberikan materi dari Dosen/pemateri dari luar, diskusi ilmiah, berkunjung ke situs-situs kewarganegaraan dalam pelaksanaannya sebelum dimulai pengurus HIMA PPKn melakukan rapat, penentuan tanggal, tema, tempat, dan waktu kegiatan tersebut, sebelum kegiatan dimulai panitia mengumpulkan peserta berdiskusi dalam menentukan biaya pendaftaran, sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan, peserta juga diberikan kesempatan bertanya dan berkompromi tentang apa yang belum dipahami dan ingin ditanyakan.

PPWNS (Program Pengenalan Wawasan Nilai Sosial)

Program Pengenalan Wawasan Nilai Sosial adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, muatan kegiatan PPWNS ini adalah Pengabdian pada masyarakat, yang dilaksanakan di suatu daerah, dengan agenda kegiatan, praktik mengajar, diskusi, dan pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai dengan pengurus mengumpulkan peserta, kemudian berdiskusi menentukan biaya pendaftaran, sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan kesempatan bertanya dan berkompromi tentang apa yang belum dipahami dan ingin ditanyakan.

Musyawahar Besar (MUBES)

Musyawahar besar adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan HIMA-PPKn untuk mengkaji kembali AD/ART dan GBHO HIMA PPKn, apabila dimungkinkan maka akan dilakukan perombakan terhadap hal-hal yang kiranya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Momentum MUBES (Musyawahar Besar) juga merupakan momentum evaluasi kinerja pengurus, untuk perbaikan kedepan. Dalam pelaksanaannya ada dialog, debat, diskusi dan kesempatan bertanya, dan mengemukakan pendapat. Sebelum dimulai pengurus HIMA PPKn melakukan rapat, pembentukan kepanitiaan, penentuan tanggal, tema, tempat, dan waktu kegiatan tersebut. Panitia juga mengumpulkan peserta untuk berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan, kemudian berkompromi dan melakukan negosiasi sehingga diputuskan menjadi aturan yang akan dipakai dan disepakati dalam kegiatan.

Komisi Pemilu Raya (KPR)

Adalah suatu bentuk kegiatan tahunan yaitu pemilihan umum yang dilakukan oleh komisi pemilu raya yang bertujuan melaksanakan kegiatan pemilihan Ketua HIMA-PPKn untuk periode selanjutnya yang dilakukan secara demokratis dengan keterlibatan mahasiswa PPKn dalam menyalurkan hak suaranya, kegiatan komisi pemilu raya ini selalu dilakukan setiap tahunnya namun terkendala dengan pendaftaran pasangan calon yang mencalonkan diri pada pemilu raya yang

dilaksanakan oleh HIMA PPKn yang menuntut pengurus HIMA PPKn mengumpulkan mahasiswa PPKn dan melakukan sidang pleno penetapan calon Ketua dan Wakil ketua HIMA PPKn melalui aklamasi dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan rapat, pembentukan kepanitiaan, penentuan tanggal, tema, tempat, dan waktu kegiatan tersebut.

Pembentukan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak

Membentuk watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan bentuk pembangunan budaya demokrasi, dalam hal pembangunan budaya demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Sejalan dengan pendapat di atas organisasi kemahasiswaan harus mampu membentuk sosok utuh mahasiswa. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan harus mampu mewadahi wujud identitas dan aktualisasi peran mahasiswa. Berdasarkan konsepsi organisasi kemahasiswaan keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) (2010:6) bahwa organisasi kemahasiswaan merumuskan orientasi dasar organisasinya sebagai berikut :

- 1 Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius. Untuk ini dibutuhkan pembukaan wahana yang seluas-luasnya bagi partisipasi-aktif anggota sehingga semua aktivitas kemahasiswaan merupakan proses pembelajaran dan pemberdayaan seluruh mahasiswa.
- 2 Mewujudkan karya nyata mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan bangsa. Untuk ini maka akar aktivitas mahasiswa, yaitu intelektualitas, kemandirian, dan kebenaran ilmiah harus benar-benar dijaga dalam roda gerak organisasi kemahasiswaan.
- 3 Menjadi wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri.

Berdasarkan konsepsi organisasi kemahasiswaan di atas, maka secara umum orientasi organisasi mahasiswa dapat sebagai wadah wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius, sebagai wadah karya mahasiswa dan wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri mahasiswa yang mencerminkan karakter warga negara yang baik.

Sejalan dengan teori di atas Erna Octavia, (Sekretaris Prodi PPKn IKIP-PGRI Pontianak) mengatakan bahwa; Selama ini pola pembinaan Program Studi PPKn dalam upaya membentuk watak kewarganegaraan (*civic disposition*) Pada HIMA PPKn diwujudkan dalam bentuk pemberian motivasi, dan perhatian kepada pengurus HIMA PPKn, serta terus melakukan koordinasi, memberikan keteladanan, memberikan apresiasi terhadap bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan HIMA PPKn, dan mengajak Dosen Prodi PPKn untuk terus mendukung dan membina

HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak.

Sedangkan menurut Ilham Surya Fallo, (Kabag Kemahasiswaan IKIP-PGRI Pontianak), mengatakan bahwa; Pola pembinaan Kemahasiswaan selama ini dalam upaya membentuk Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Pada HIMA PPKn dilakukan dengan membudayakan semaksimal mungkin memberikan suatu kebijakan yang sesuai standar yang sesuai dengan kemampuan dari lembaga, terkait dengan anggaran yang diperlukan oleh HIMA PPKn, Memberikan masukan terkait kegiatan dan terus melakukan koordinasi, maupun memberikan motivasi kepada ORMAWA dan mensosialisasikan akan pentingnya proses penentuan kebijakan dan keputusan melalui musyawarah dan mufakat,

Sejalan dengan paparan di atas, Aris Kastowo (Kabid Kestariatan HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak) juga mengatakan bahwa selama ini pembentukan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Pada HIMA PPKn dilakukan dengan upayakan melalui Keteladanan, dimana menurutnya keteladanan merupakan sesuatu yang penting dimiliki dengan keteladanan yang baik. Beliau juga menambahkan bahwa alur koordinasi HIMA dan BEM juga selalu dilakukan dengan cara Koordinasi dan Kompromi, koordinasi dilakukan dalam upaya meminta pandangan dan pendapat terkait suatu permasalahan yang menyangkut lembaga kepada mahasiswa, selain itu program pembinaan dan pembentukan karakter dilakukan dengan razia rutin kepada mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap senin dan kamis.

Berdasarkan pendapat informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, Pembentukan Watak Kewarganegaraan pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini dilakukan melalui: Memberikan Pemahaman akan pentingnya organisasi, Memberikan Keteladanan, Penanaman Kesadaran Tanggung Jawab, Melakukan Komunikasi Interaktif, Diskusi Rutin, Melakukan Pembinaan Karakter, dan Memberikan Motivasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hidayat, dan Azra (2008:38) bahwa dalam rangka pembentukan karakter warga negara dapat diwujudkan dengan membina dan menumbuhkan: (1) Kesadaran akan Pluralisme; (2) Pembinaan sesuai dengan tujuan; (3) Kejujuran dan Pemufakatan; (4) Tanggung jawab; (5) Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban; (6) *Trial dan Error*.

Untuk memperkuat hasil wawancara maka peneliti memaparkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, berdasarkan pengamatan selama ini peran HIMA PPKn dalam upaya pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), hanya sebatas pada pemberian pemahaman akan pentingnya organisasi, motivasi kepada pengurus, memberikan pemahaman akan pentingnya tanggung jawab, memberi keteladanan, dan melakukan pembinaan karakter. Sementara Program Studi PPKn hanya sebatas memberikan motivasi, menanamkan kesadaran, memberikan

penghargaan, memberikan saran dan masukan, berkoordinasi, dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak.

Selain itu upaya pembentukan watak kewarganegaraan yang dilakukan oleh Kemahasiswaan IKIP-PGRI Pontianak sendiri, juga hanyab sebatas memberikan kebijakan yang sesuai standar yang sesuai dengan kemampuan dari lembaga, terkait dengan anggaran yang diperlukan, Selain itu memberikan masukan terkait kegiatan dan terus melakukan koordinasi, motivasi kepada organisasi mahasiswa (ORMAWA), membangun hubungan orang tua dan anak, memberikan solusi, mensosialisasikan akan pentingnya proses penentuan kebijakan dan keputusan melalui musyawarah dan mufakat, termasuk menginstruksikan setiap pergantian kepengurusan yang dilakukan HIMA PPKn dapat dilakukan melalui proses musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa, pembentukan watak kewarganegaraan yang dilaksanakan HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini dilakukan dengan:(1) Memberikan pemahaman akan pentingnya organisasi, diwujudkan dengan senantiasa mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada pengurus tentang manfaat, dan fungsi berorganisasi; (2) Memberikan Keteladanan, diwujudkan dengan sikap yang senantiasa dapat di contoh dan ditiru oleh mahasiswa, hal tersebut dimulai dari Pengurus HIMA, Dosen Prodi maupun Kemahasiswaan IKIP-PGRI Pontianak; (3) Penanaman Kesadaran Tanggung Jawab dilakukan dengan melaksanakan evaluasi kinerja kepengurusan, hal ini dilakukan untuk menilai, memberikan saran dan mengingatkan tugas dan fungsi kepengurusan, maupun program kegiatan yang perlu dilakukan; (4) Melaksanakan Diskusi Rutin, diskusi merupakan sarana bertukar pikiran dalam menjawab permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan pengurus dalam rangka menyerap aspirasi mahasiswa PPKn; (5) Melakukan Komunikasi Interaktif dilaksanakan dengan senantiasa dengan kesadaran melaksanakan fungsi koordinasi, dan kompromi HIMA, Prodi, serta Dosen Kemahasiswaan dengan menyampaikan ide, gagasan, maupun permasalahan yang dihadapi; (6) Melakukan Pembinaan Karakter yang dilakukan oleh Prodi, Kemahasiswaan, Pembinaan karakter prodi, dan kemahasiswaan kepada pengurus HIMA PPKn salah satunya diwujudkan melalui pelatihan serta razia rutin yang dilaksanakan HIMA PPKn. (7) Memberikan Motivasi, diwujudkan dengan menghadirkan suatu pemikiran serta gagasan baru kepada HIMA PPKn, dengan tujuan meningkatkan kreativitas, dan semangat mahasiswa dalam bentuk pujian dan apresiasi terhadap hasil pencapaian HIMA PPKn.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya demokrasi merupakan pola pikir, dan sikap warga negara yang berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI

Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu: memiliki kepribadian demokratis, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, memiliki sikap tanggung Jawab, memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan. Apabila nilai-nilai budaya demokrasi dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada mahasiswa, sedangkan kesimpulan secara khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wujud nilai budaya demokrasi yang di implementasikan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak untuk membentuk Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) tercermin dalam bentuk sikap yaitu: (1) Kepribadian Demokratis, diwujudkan melalui sikap hangat pada orang lain, ramah dan saling menyapa; (2) Menjunjung Tinggi Toleransi, diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, termasuk perbedaan sudut pandang dan pendapat; (3) Kebebasan Mengemukakan Pendapat ditunjukkan dengan tersedianya ruang kebebasan berpendapat yang diberikan oleh HIMA PPKn; (4) Memiliki Kebersamaan, dengan menciptakan suasana kekeluargaan dan hubungan yang kuat guna memperkuat tali persaudaraan; (5) Mengutamakan kepentingan publik, sikap kerelaan mengorbankan kepentingan atau keperluannya sendiri tetapi mengutamakan kepentingan HIMA PPKn; (6) Memiliki Nasionalisme yang ditunjukkan dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, salam kebangsaan organisasi HIMA PPKn.

Program Kegiatan Implementasi Budaya Demokrasi Untuk Membentuk Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) Pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak dilakukan melalui: (1) Stand Kreasi, Adalah bentuk kegiatan pengenalan mahasiswa baru terkait dengan kampus, program studi dan organisasi HIMA PPKn; (2) Silaturahmi Lingkungan Akademis (SILA) Merupakan kegiatan silaturahmi antar pengurus HIMA PPKn, Dosen Prodi, dan Senior dan Mahasiswa baru; (3) Pengenalan Kemampuan Wawasan Ilmiah (PKWI) Adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menanamkan sikap ilmiah mahasiswa PPKn, bentuk kegiatannya seperti kuliah umum, observasi ke situs-situs kewarganegaraan, serta debat kritis; (4) Pengenalan Wawasan Nilai Sosial (PPWNS) Merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn, yang bertujuan meningkatkan kreatifitas dan kemampuan mahasiswa yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat realistik, kemudian dapat berperan aktif untuk meningkatkan dan mampu memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang terdapat dilingkungan masyarakat; (5) Musyawarah Besar, merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk membahas AD/ART/GBHO HIMA PPKn; (6) Komisi Pemilu Raya, merupakan kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua HIMA PPKn melalui proses demokrasi langsung, dan diwujudkan dengan tanggung jawab, Kepedulian, Kebersamaan, Rasa Memiliki, Persamaan Kedudukan, Memberi Kebebasan

Mengemukakan Pendapat, Menghargai perbedaan, serta Meletakkan Musyawarah dan Mufakat sebagai landasan pemecahan setiap permasalahan.

Pembentukan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak dilakukan dengan cara yaitu; (1) Memberikan Pemahaman akan pentingnya organisasi, diwujudkan dengan senantiasa mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada pengurus tentang manfaat, dan fungsi berorganisasi, sehingga mampu berkontribusi dengan baik pada organisasi sesuai dengan tujuannya; (2) Memberikan Keteladanan, dalam bentuk sikap dan perbuatan yang patut di contoh atau ditiru yang ditunjukkan oleh Ketua HIMA PPKn, Pengurus, dan Dosen Program Studi PPKn; (3) Penanaman Kesadaran Tanggung Jawab dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan, maupun dilakukan dengan evaluasi kinerja kepengurusan; (4) Melaksanakan Diskusi Rutin, yang merupakan pertemuan antara pengurus dan mahasiswa PPKn yang bertujuan menyerap aspirasi mahasiswa PPKn; (5) Komunikasi Interaktif, dilaksanakan dengan senantiasa dengan kesadaran melaksanakan fungsi koordinasi, dan kompromi HIMA, Prodi, serta Dosen Kemahasiswaan dengan menyampaikan ide, gagasan, maupun permasalahan yang dihadapi; (6) Melakukan Pembinaan Karakter, dilakukan oleh Prodi, dan Kemahasiswaan, Kepada Pengurus HIMA PPKn, salah satunya melalui koordinasi, pelatihan, serta razia rutin yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn; (7) Memberikan Motivasi, dilakukan melalui pujian dan apresiasi terhadap hasil pencapaian HIMA PPKn, dengan tujuan memacu pengurus untuk bekerja lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus (2011). *Pendidikan Politik* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia dan Penerbit Mutiara Press
- Cholisin (2013) *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak
- Darmadi, Hamid (2012). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Fuady, Munir (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gatara, Sahid (2009). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mufti, dan Naafisah, (2013), *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung; Pustaka Setia
- Rozak, A. Dan Ubaedillah (2003), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana
- Soedarsono, S. (2002), *Character Building (membentuk watak): Mengubah Pemikiran, Sikap, dan perilaku Untuk membentuk Pribadi Efektif Guna Mencapai Sukses Sejati*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono (2012), *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Winaputra, S. udin (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press
- Winarno, (2015), *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika